

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak satu pun negara bangsa di dunia ini yang mampu melepaskan diri dari ketergantungan satu sama lain. Begitu juga keikutsertaan suatu negara bangsa dalam percaturan politik internasional, sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi domestik negara yang bersangkutan.

Disini dapat terlihat, bahwa suatu pola hubungan antar anggota satuan masyarakat lazimnya disebut hubungan internasional, yang merupakan bentuk interaksi satu sama lain anggota satuan masyarakat yang berbeda baik yang bertindak atas nama negara maupun tidak.<sup>1</sup>

Berkaca dari kenyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa politik luar negeri bukan hanya kepanjangan dari politik dalam negeri suatu negara, tetapi juga merupakan suatu reaksi terhadap tantangan berat yang disebabkan oleh perkembangan tatanan dan dinamika internasional dimana negara saling berinteraksi. Pemahaman politik luar negeri seperti ini semakin signifikan dirasakan

---

<sup>1</sup> K.J, Holsti, *Politik Internasioanal Suatu Kerangka Analisa*, ter, Wawan Juanda, Binacipta, dalam skripsi Rulia Rahmi, *Kinerja Perusahaan Asing Di Indonesia*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2006, hal.1.

dewasa ini, ketika hubungan internasional mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, ditandai dengan beragamnya isu dan aktor yang berperan.

Munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional yang berkaitan erat dalam menentukan arah sebuah kebijakan politik global, salah satunya kehadiran Organisasi Internasional yang telah merubah wajah dan warna pecaturan politik global.

Hampir seluruh negara di dunia ini tergabung dan menjadi anggota berbagai organisasi internasional, karena mereka memandang bergabung dengan organisasi internasional tersebut akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi kepentingan nasionalnya, namun apa yang terjadi sebaliknya dengan negara kita Indonesia, sebuah fenomena yang langka dan anomali terutama dalam percaturan politik global.

Indonesia membuat sebuah kebijakan yang fenomenal dipertengahan tahun 2008, melalui menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan *The Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), ia menyatakan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui rapat kabinet.<sup>2</sup> Berdasarkan pernyataan diatas tersebut penulis memandang ini adalah sebuah kebijakan yang langka dan berseberangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagaimana yang teramanat dalam UUD 1945. Kebijakan yang diambil oleh

---

<sup>2</sup> *Indonesia Keluar dari OPEC, Ada Apa?*, (accessed, May 29th, 2008); <http://jurnal-ekonomi.org/2008/05/29/indonesia-keluar-dari-opec-ada-apa/>

pembuat kebijakan di negara ini bertolak belakang dengan negara lain, karena hampir dipastikan semua negara ingin memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Salah satu jalan yang ditempuh menuju hal tersebut, menjadi pencetus gagasan berdirinya sebuah komunitas internasional ataupun organisasi internasional yang mampu memainkan perannya dalam hal apapun baik sosial, ekonomi, keamanan, dan politik, selain itu melalui cara lain yang dapat ditempuh yakni bergabung dan menjadi anggota yang memiliki peran serta sehingga mampu mempengaruhi setiap kebijakan yang ada pada organisasi internasional yang bergengsi tentunya sehingga dapat dipastikan hal ini akan menaikkan posisi tawar negara bersangkutan.

Selain alasan diatas tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi ini karena belum pernah diangkatnya judul yang bersangkutan sebagai judul skripsi di program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Melihat fenomena aneh dan alasan ke dua inilah yang mendorong penulis untuk menganalisa lebih jauh permasalahan Indonesia di OPEC yang ditandai dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri. Permasalahan tersebut penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi yaitu: **Kebijakan Pemerintah Indonesia Keluar dari OPEC Di Tahun 2008.**

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu penulisan ilmiah bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang fenomena tertentu yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk : Menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2008.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi sebuah negara bangsa yang mampu berperan aktif dalam setiap proses pembuatan kebijakan yang menentukan arah masa depan dunia, apalagi kebijakan itu menyangkut posisi tawar sebuah negara dalam percaturan politik global dan pastinya dengan terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang mampu dengan baik memainkan peran itu, yakni terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan tersebut tentunya demi tercapainya kepentingan nasional yang bertujuan memakmurkan rakyat dan pada level lebih tinggi untuk kepentingan umat manusia dengan cara berperan aktif di kancah global sesuai dengan koridor hukum dan Politik Luar Negeri kita yang bebas aktif. Keikutsertaan Indonesia dalam kancah global tidak bisa diragukan lagi, tinta emas sejarah telah tertoreh bahwa bangsa kita adalah salah satu pencetus Gerakan Non-Blok dilanjutkan Konferensi Asia Afrika, ASEAN, G15 dan tergabung dalam OKI serta tidak kalah bergengsinya

adalah kita salah satu dari 13 negara anggota Organisasi negara-negara pengeksport minyak atau *The Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) yang menguasai 40% pasar minyak dunia.<sup>3</sup> Disini jelas OPEC adalah organisasi internasional yang cukup memainkan peran penting dalam menentukan perputaran ekonomi global, karena penguasaannya yang cukup besar dalam pasar minyak dunia yang belum mampu lepas dari ketergantungan akan sumber minyak bumi.

Organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC) didirikan pada 1960 dengan tujuan mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak kepada kedaulatan pemiliknya yang umumnya negara berkembang. Organisasi ini, menurut anggaran dasarnya, bertujuan menyatukan kebijakan serta melindungi kepentingan anggotanya.<sup>4</sup> Itulah tujuan utama dari pendirian OPEC dalam mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak yang sebelum terbentuk di kuasai oleh perusahaan multinasional negara-negara kaya dan maju, mereka menikmati pasar minyak dunia, namun dengan lahirnya OPEC keadaan itu pun drastis berubah. Penguasaan minyak bumi tidak hanya terfokus pada segelintir negara maju yang merupakan perpanjangan tangan dari MNC, tapi kini juga dimiliki oleh sekelompok negara berkembang yang kaya akan sumber minyak dan mereka tergabung dalam organisasi yang solid.

---

<sup>3</sup> *Beda Kepentingan, RI Keluar dari OPEC*, (diakses 30 Mei 2008); <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=475>

<sup>4</sup> *OPEC dan Indonesia*, (diakses 09 Juli, 2008) ; <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/09/Utama/ut03.htm>

Berbagai upaya dilakukan OPEC dalam menjalankan fungsinya yaitu: menstabilkan harga di pasar internasional, berupaya mencegah fluktuasi, mengamankan penerimaan minyak yang tetap untuk anggota serta sekaligus menjamin pasokan yang teratur, efisien, dan ekonomis kepada negara-negara konsumen, selain itu juga memperhatikan keuntungan yang pantas untuk investor.

Dengan melihat perjuangan organisasi tersebut mendorong Indonesia bergabung dengan OPEC pada tahun 1962. OPEC merupakan organisasi perjuangan negara-negara ketiga dan pada saat itu Indonesia telah menjadi pengeksport minyak, sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC lainnya. Dengan bergabungnya menjadi anggota OPEC, Indonesia mendapat berbagai keuntungan antara lain dari segi ekonomi, kita menikmati kenaikan harga minyak dari US\$ 2 per barrel menjadi US\$ 12 setelah embargo minyak perang Arab-Israel, 1974.<sup>5</sup> Kenaikan harga minyak 600% tersebut memberi mamfaat yang sangat besar bagi Indonesia yang tengah berada dipuncak produksi. Pada tahun 1980an pun Indonesia juga kecipratan rejeki akibat harga minyak mentah kembali meroket, dari sekitar 13 dollar di tahun 1978 menjadi sekitar 32 dollar per barrel di tahun 1980 dan menjadi sekitar 35 dollar per barrel di tahun 1981. Secara matematisnya jika pada saat itu produksi minyak RI sekitar 1.6 juta barell dan kebutuhan dalam negeri hanya 1 jutaan barell, maka surplus sekitar 600.000 barell, jadi devisa yang masuk sekitar US\$ 21 juta. Kenaikan harga minyak dunia yang sangat besar ini sangat berperan sekali menghasilkan devisa dan tentu saja

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 2.

membantu pembangunan Indonesia dikala itu. Selain itu mamfaat ekonomi lainnya yang kita dapat melalui dana OPEC Funds (lembaga keuangan OPEC) telah memberikan bantuan dana darurat sebesar 1,2 juta Euro, dimana separuhnya diperuntukkan bagi Indonesia, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh serta Sumatera Utara yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada akhir tahun 2004.

Keanggotaan di OPEC juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum internasional, antara lain Indonesia mendapatkan gengsi politik OPEC yang memang diperhitungkan dikancah global. Memang yang berpengaruh besar dalam menentukan harga di OPEC tentulah negara-negara produsen minyak besar, seperti Arab Saudi, Iran dan Irak. Suara Indonesia diperhitungkan di OPEC sebab, negara kita cukup besar diantara negara anggota. Dengan demikian Indonesia mampu memainkan peran sebagai mediator antara negara Arab yang bersikap keras dan berseberangan, yakni Arab Saudi, Iran, Irak dan Lybia, yang sering bersaing pengaruh antara satu dengan lainnya.

OPEC merupakan organisasi yang sangat disegani di antara organisasi-organisasi negara-negara berkembang, karena OPEC memiliki solidaritas dan diplomasi yang tinggi, hal ini sering dimanfaatkan Indonesia dalam diplomasinya menghadapi permasalahan nasional, seperti HAM dan integritas nasional. Selain itu dengan bergabungnya Indonesia dalam OPEC, tentu mempunyai posisi yang strategis secara geopolitik karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan OPEC sekaligus Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, yang mampu menjembatani kepentingan negara-

negara muslim dengan barat. Sejarahpun mencatat Indonesia telah melahirkan figur-figur terkenal sebagai mediator yang tangguh. Sebagai negara besar dan satu-satunya anggota dari Asia Tenggara, OPEC menganggap posisi Indonesia sangat strategis di organisasi itu. Indonesia sudah dianggap sama seperti *founder members* karena di samping peran historisnya, negara kita juga salah satu anggota tertua.

Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang mengiringi perjalanan Indonesia, tentu saja ini sangat berpengaruh besar terhadap keanggotaannya di OPEC. Perubahan itu terjadi tepatnya pada tahun 1996-1998, Indonesia mengalami goncangan hebat dalam tatanan politik domestiknya, yakni krisis multidimensi yang berawal dari krisis sektor keuangan, malapetaka itu berawal dari jatuhnya nilai tukar bath Thailand terhadap dolar Amerika Serikat dan diikuti mata uang Asia lainnya hingga terus merembet menjadi krisis moneter di seluruh Asia tak tertinggal Indonesia yang terparah. Krisis finansial yang merontokan perkenomian Indonesia akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US\$, merupakan awal krisis multidimensi di Indonesia yang berakibat instabilitas politik dan keamanan. Kekacauan dan demonstrasi terjadi hampir diseluruh negeri, menuntut lengsernya Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun sebagai presiden, rakyat menilai Soehartolah biang keladi dari krisis semua ini. Melalui bendera reformasi yang dimotori mahasiswa mendesak Soeharto mundur. Akhirnya Tuntutan itu dijawab, pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur.

Paska lengsernya Soeharto, kiprah politik luar negeri Indonesia cenderung melemah, terlebih sejak krisis moneter 1997-1998 yang disusul krisis multidimensi,

orientasi Indonesia cenderung pada urusan domestik. Politik luar negeri Indonesia paska Soeharto sangat berbeda dengan dua pemerintahan yang lalu, dimana politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan pada usaha pemulihan citra nasional yang memburuk di forum Internasional. Di tengah situasi 1997-1998, keterperukan di segala aspek mencederai citra Indonesia, tak mengherankan apabila pemerintahan paska-1998, yakni BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati gencar untuk memulihkan kredibilitas dan citra Indonesia dimata internasional. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden RI ke-6 melalui pemilihan langsung tahun 2004, SBY mewarisi berbagai persoalan multidimensi akibat krisis ekonomi yang belum tuntas secara utuh oleh pendahulunya.

Tidak mengherankan juga SBY mengambil langkah-langkah yang sama seperti pendahulunya di era reformasi dulu, terlebih terhadap politik luar negeri Indonesia. Fokusnya utamanya tetap sama, yaitu memulihkan citra Indonesia yang tercoreng dimata Internasional, apalagi disaat terjadi berbagai peledakan bom disejumlah tempat yang memakan banyak korban warga negara asing, tentu ini persoalan yang tidak mudah bagi SBY dan jajarannya, SBY tentu harus mengangkat citra Indonesia yang kian tecoreng parah di forum Internasional. Disamping itu, Indonesia dalam menjalankan misi politik luar negerinya juga disibukkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia internasional, tentu ini berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah berkuasa. Sejarah pernah mencatat Indonesia sangat terkenal dan handal memainkan perannya di dunia internasional, tapi kini peran Indonesia mulai surut terlebih pasca krisis parah 1997-

1998 dulu, hal ini juga yang membuat beberapa pemerintahan di zaman reformasi tidak terlalu mempersolkan keanggotaan RI di OPEC.

Namun berbeda halnya dengan pemerintahan SBY, sebagaimana setiap negara yang menjalani kebijakan dan politik luar negerinya, tentu punya motif yang intinya adalah demi kepentingan nasional, begitu juga halnya Indonesia. Salah satu kebijakan penting luar negeri yang diambil pemerintah Indonesia paska-reformasi dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono adalah keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008 ini, pemerintah beranggapan kebijakan ini lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi terkini. Padahal dalam sejarah OPEC yang hampir mencapai 50 tahun, OPEC dan dunia mengakui peran penting Indonesia dalam masa-masa sulit organisasi ini, antara lain: dalam membina hubungan antara negara produsen dan konsumen demi mencari jalan stabilisasi pasar minyak dunia, tapi itu adalah cerita lama, kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dengan melihat berbagai latar belakang yang telah diutarakan tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

**Mengapa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan keluar dari OPEC di tahun 2008?**

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia keluar dari OPEC maka teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah, *decision-making theory* (teori pembuatan keputusan), khususnya *foreign policy decision-making* (teori pembuatan kebijakan luar negeri). Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Selain itu teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “eksekutif,” melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu “mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara.”<sup>6</sup>

Teori pembuatan keputusan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri.

---

<sup>6</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto dan Tulus Warsito, dalam Harwanto Dahlan, *Modul Diplomasi: Politik Luar Negeri*, (diakses, 1 November, 2008); FISIPOL UMY, 2000, hal. 1.

Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah: “Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya”. Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.

Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.<sup>7</sup> Sedangkan William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Politik Dalam Negeri
2. Kondisi Ekonomi dan Militer
3. Konteks Internasional<sup>8</sup>

Interaksi faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan politik luar negeri, digambarkan dalam skema sebagai berikut :

---

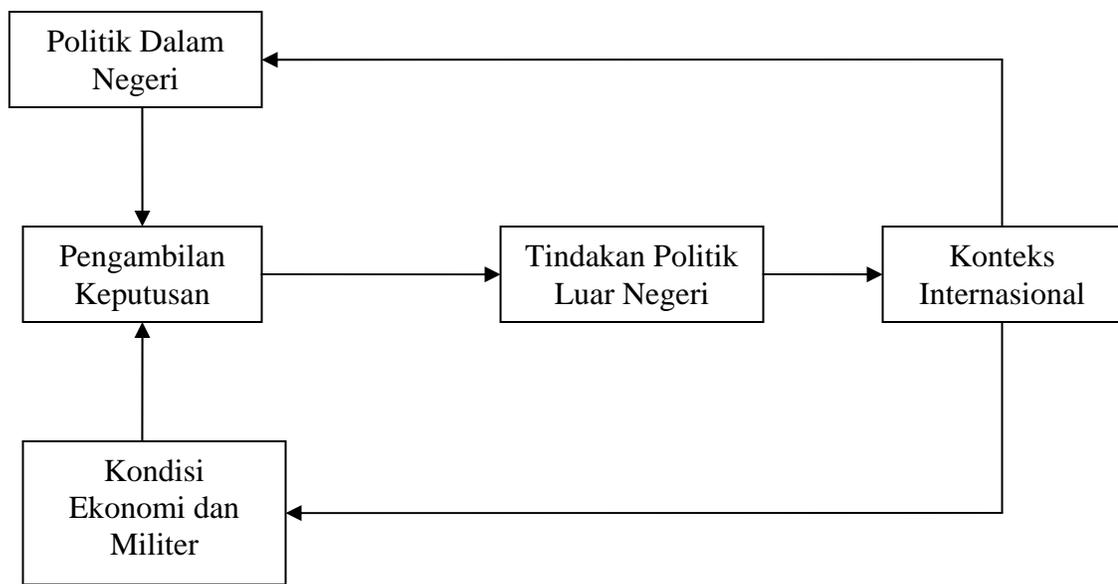
<sup>7</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3<sup>rd</sup> ed. dalam skripsi, Barid Kurnia Rakhman, *Pasang Surut Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Kurun Waktu 1999-2007*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta 2008. hal.19.

<sup>8</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 30.

### Gambar I.1

### Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

William D. Coplin



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk keluar dari OPEC tahun 2008 adalah :

1. Kondisi politik dalam Negeri

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik yang berjalan beserta

variable-variable yang mempengaruhinya. *Domestic Politic* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Dimana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.<sup>9</sup>

Pasca reformasi keadaan politik dalam negeri Indonesia relatif lebih kondusif dan stabil, terutama saat pemerintahan SBY yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia pada tahun 2004 silam, yang dinilai mempunyai gaya kepemimpinan lebih bersahaja dan penuh pertimbangan dalam setiap kebijakannya pemerintahan lebih dan sebagian pengamat menilai terlalu lamban dalam bertindak dan sangat hati-hati. Gaya kepemimpinan itulah yang mendorongnya sangat hati-hati dalam mengambil setiap langkah kebijakannya, demi stabilitas negara, meski demikian perasaan tidak puas selalu ada, seperti penanganan bencana alam yang lambat, kasus peledakan bom bali, demonstrasi mahasiswa dan lainnya, riak-riak kecil itu pun tidak terlalu mengganggu stabilitas keamanan dan politik dalam negeri. Beberapa waktu lalu pemerintahan SBY diuji dan menyita perhatian besar publik negeri ini, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2008 pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebesar 27,5%. Akibat kenaikan BBM, hampir terjadi aksi penolakan dan demonstrasi di seluruh Indonesia yang kebanyakan dari kalangan

---

<sup>9</sup> Op.Cit., hal 171

mahasiswa dan masyarakat kecil. Terlebih telah terjadi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan berdarah di Jakarta, tentu saja ini membuat terganggunya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia, namun pemerintah bersikap tanggap dan dapat terselesaikan. Dilihat dari kian kondusifnya stabilitas dalam negeri, dalam hemat penulis inilah dalah satu alasan pemerintah mengambil langkah keluar dari OPEC.

## 2. Keadaan ekonomi dan militer

Faktor ke dua ini tidak kalah penting yaitu, keadaan ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain. Kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (Gross National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan sekonomi tersebut.<sup>10</sup> Jadi dapat diasumsikan bahwa, semangkin besar GNP negara bersangkutan maka semangkin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, kekuatan militer suatu negara dapat ditaksir kapasitasnya dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan, serta sifat

---

<sup>10</sup> Op.Cit., hal 151

perlengkapan militer.<sup>11</sup> Selain itu, hal penting lainnya dalam kekuatan militer suatu negara adalah besar anggaran yang di alokasikan pemerintah dalam pembangunan militer. Tidak salah Amerika Serikat adalah negara yang terkuat di dunia militernya karena perhatian yang besar di berikan pemerintahnya.

Kebijakan Indonesia keluar dari OPEC jika dilihat dari segi militer memang tidak ada kaitannya, tetapi jika dilihat dari segi ekonomi pengaruhnya sangat besar. Ini berdasarkan asumsi pemerintah, alasannya adalah tingginya tingkat konsumsi BBM dalam negeri yang harus diimpor daripada produksi yang ada, merupakan indikator penting di keluarkanya kebijakan kenaikan BBM dan berpengaruh langsung terhadap keberadaan Indonesia di OPEC. Berdasarkan data yang didapat, produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph (barel per hari), dewasa ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 60-70 persen dan sisanya porsi biaya produksi dan hak mitra bagi hasil. Dengan konsumsi Indonesia yang lebih dari satu juta bph BBM, harus diimpor 300.000 bph minyak mentah dan 400.000 bph BBM, yang artinya secara keseluruhan Indonesia sudah benar-benar menjadi *net-importer*, oleh karena itu, kepentingan Indonesia sudah bergeser dari *net-exporter* menjadi *net-importer*.<sup>12</sup> Kenyataan diatas memang tidak dapat dipungkiri, keadaan negara telah berubah.

Tidak terkendalinya harga minyak dunia yang terus fluktuatif yang sempat menyentuh level US\$ 147 perbarel, berakibat pada kian meningkatnya beban

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 124

<sup>12</sup> *OPEC Dan Indonesia*,(diakses 03 Juni, 2008); <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=201208>.

subsidi yang oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 200 trilyun sampai dengan Rp 300 trilyun/tahun .<sup>13</sup> Hal ini tentu saja sangat memberatkan APBN, karena besarnya subsidi yang di tanggung negara dan hal ini juga membuat semakin tersedotnya devisa untuk impor minyak dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang sepenuhnya bergantung pada minyak bumi. Selain itu juga beban iuran tahunan yang besarnya 2 juta dollar AS ( sekitar 19 milyar) per tahun. Kenyataan di ataslah yang menurut hemat penulis mempengaruhi dibuatnya kebijakan untuk keluar dari OPEC oleh pemerintah SBY.

#### Konteks Internasional

Faktor ketiga adalah konteks internasional, yang berupa situasi internasional dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya yang ditujukan dalam mempengaruhi negara-negara lain. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik suatu negara.

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu di jelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dianggap bahwa politik luar negeri adalah penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.<sup>14</sup> Jika kita hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu keluarnya Indonesia dari

---

<sup>13</sup> *Indonesia Keluar dari OPEC, Ada Apa?* (accessed May 29th, 2008); <http://jurnal-ekonomi.org/2008/05/29/indonesia-keluar-dari-opec-ada-apa/>.

<sup>14</sup> Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, dalam skripsi Rulia Rahmi, *Kinerja Perusahaan Asing Di Indonesia*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2006, hal 13.

OPEC tahun 2008. Ini sangat berkaitan erat pada kondisi yang ada di Indonesia yaitu, konteks internasional yang turut andil dalam keputusan pemerintah.

Kenaikan harga minyak dunia yang fantastis akibat tidak menentukannya politik di timur tengah terutama Palestina, Irak, dan Suriah, namun pada sisi lain dengan kenaikan harga ini menjadi berkah tersendiri bagi negara kaya minyak, sebab negara-negara pengekspor minyak secara tiba-tiba mendapatkan pemasukan yang berlipat-lipat dari penjualan minyak mereka. Itulah yang saat ini terjadi di negara-negara anggota OPEC dan Timur Tengah. Menjadi net-importir minyak sejak tahun 2003 menjadikan posisi Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Dengan posisi produksi dan konsumsi minyak Indonesia diatas, sebenarnya pertimbangan keluar dari OPEC sangat beralasan karena sebagai net-importir minyak, Indonesia memiliki kepentingan agar harga minyak rendah. Keinginan ini justru bertentangan dengan OPEC yang ingin harga minyak tetap tinggi.<sup>15</sup> Disini tampak jelas antara Indonesia dan OPEC telah terjadi perbedaan kepentingan yang mendasar. Keluarnya Indonesia dari OPEC juga berarti dapat menghemat dua juta dolar pertahun yang merupakan iuran wajib keanggotaan OPEC. Itulah beberapa alasan yang menguatkan dan meyakinkan pemerintah dalam mengabil kebijakan luar negerinya.

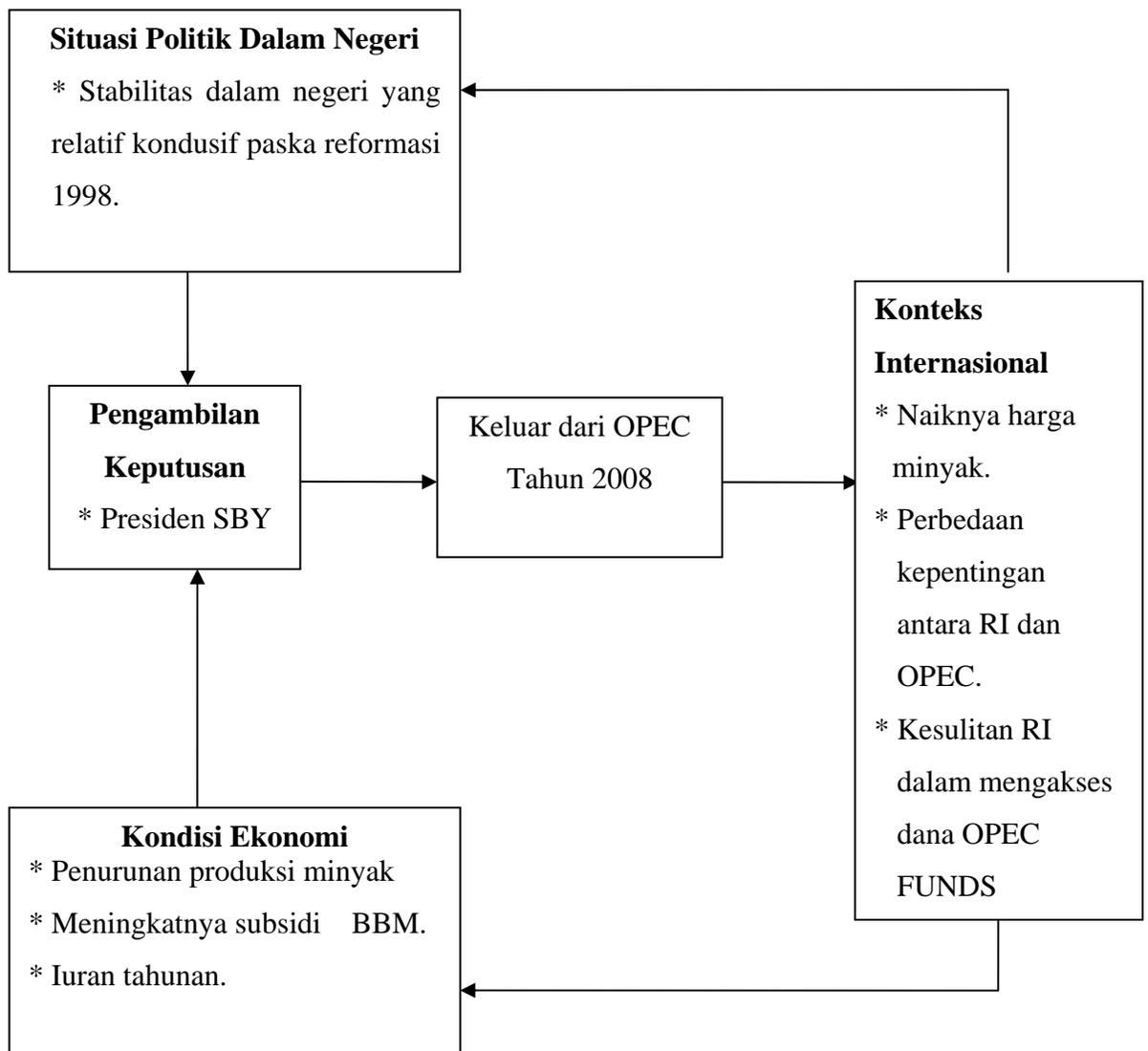
---

<sup>15</sup> *Dilema Keanggotaan OPEC* (diakses, 17 Juli, 2008);  
<http://dosen.tf.itb.ac.id/brian/2008/06/17/dilema-keanggotaan-opec/>.

Dari variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas tersebut, sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara termasuk Indonesia.

**Gambar I.2**

**Variabel-Variabel yang Menjelaskan Situasi Dalam Negeri Dan Internasional**



Dengan demikian, konteks internasional dan situasi dalam negeri Indonesia tersebut menjadi bahan pertimbangan Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri untuk keluar dari keanggotaan OPEC di tahun 2008.

## **F. Hipotesa**

Dengan merunut pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka hipotesa yang dirumuskan dalam penulisan ini disebabkan oleh:

### **1. Kondisi Politik Dalam Negeri**

Kondisi politik dalam negeri Indonesia yang relatif kondusif paska krisis multidemensi 1997-1998, sehingga munculnya pro dan kontra tentang keberadaan RI di OPEC, namun tekanan keluar lebih besar dari dalam negeri sehingga mendorong pemerintah SBY mengambil kebijakan keluar dari OPEC sebab tidak memberi keuntungan yang berarti lagi.

### **2. Kondisi Ekonomi**

Turunnya produksi minyak Indonesia sejak 1996 menjadikan *net-importer* tahun 2003 akibat kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, sehingga sumber pendapatan devisa dari sektor minyak terus berkurang.

### **3. Konteks Internasional**

Kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi hingga US\$ 147/barrel, kian mempersulit posisi Indonesia di OPEC yang notabene net-importir sehingga mengakibatkan perbedaan kepentingan antara Indonesia

dan negara-negara produsen utama di OPEC, selain itu kesulitan penggunaan dana OPEC Funds yang telah berpuluh tahun disetorkan.

### **G. Jangkauan penelitian**

Untuk mempermudah melaksanakan analisa, maka penulis memberikan bantasan jangkauan dalam penulisan hanya dari segi politik, ekonomi dan konteks internasional dari rentang waktu 1996-2008, terutama saat menurunnya produksi minyak mentah Indonesia sejak 1996 dan melonjak tingginya harga minyak dunia kuartal 2004-September 2008.

### **H. Metode Pengumpulan data**

Dalam memperoleh data guna memahami serta menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang digunakan adalah berasal dari: buku-buku, website, surat kabar, dan majalah serta artikel. Dari beberapa sumber itulah penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

**Bab 1**, merupakan pertanggungjawaban metodologis penulisan ini, yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan juga sistematika penulisan.

**Bab 2**, menggambarkan dinamika hubungan Indonesia dan OPEC, yang meliputi sejarah perminyakan Indonesia, sejarah berdirinya OPEC, dan proses bergabungnya Indonesia di OPEC.

**Bab 3**, menggambarkan keuntungan yang didapat Indonesia selama bergabung dengan OPEC, yang terdiri dari dekade 1962-1996 dan keuntungan dekade 1996-2008 serta problematika yang memicu proses keluarnya Indonesia dari OPEC.

**Bab 4**, dalam bab ini penulis hendak melakukan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendorong pemerintah Indonesia mengambil kebijakan keluar dari OPEC, berdasarkan kondisi Politik dalam negeri, ekonomi dan militer serta konteks luar negeri.

**Bab 5**, merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisan ini yang mana merupakan rangkuman dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya